

Implementasi ASEAN *Tourism Strategic (ATSP) Plan* dalam Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi

Bagus Alfian Pujo Santoso¹, Kanom², Randhi Nanang Darmawan³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Banyuwangi, Banyuwangi, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received 3 January 2023
Received in revised form
11 Februari 2023
Accepted 20 February 2023
Available online 24 Maret
2023

Kata Kunci:
ASEAN, ATSP, Kabupaten
Banyuwangi, Kebijakan
Pariwisata,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keselarasan arah kebijakan terhadap implementasi kerangka ASEAN *Tourism Strategic Plan* pada tatanan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis Miles and Huberman. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini mencakup elemen pentahelix dengan objek inti berbasis pada kerangka ATSP periode 2016-2025 dan Kebijakan pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi sudah mengimplementasikan kerangka acuan pengembangan pariwisata berdasarkan ASEAN *Tourism Strategic Plan (ATSP)* pada tatanan kebijakan pariwisata daerah secara parsial. Namun, dari kedua arah pengembangan pariwisata ASEAN yang juga merupakan turunan Kebijakan Pariwisata Nasional, untuk saat ini Kabupaten Banyuwangi belum mengorientasikan arah pengembangan pariwisata menuju pariwisata tunggal, melainkan pariwisata unggulan.

ABSTRACT

This study aims to determine the alignment of policy directions with the implementation of the ASEAN Tourism Strategic Plan framework in the Regional Government policy arrangements in the development of the tourism sector in Banyuwangi Regency. The type of approach used in this study is descriptive qualitative with the Miles and Huberman analysis technique. The subjects involved in this study include pentahelix elements with core objects based on the ATSP framework for the 2016-2025 period and Banyuwangi Regency tourism policy. Based on the analysis conducted, the results of this study indicate that Banyuwangi Regency has partially implemented the terms of reference for tourism development based on the ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) in regional tourism policy arrangements. However, from the two directions of ASEAN tourism development which are also derivatives of the National Tourism Policy, for now Banyuwangi Regency has not oriented the direction of tourism development towards single tourism, but leading tourism.

Keywords: ASEAN, ATSP, Banyuagi Regency, Tourism Policy

Pendahuluan

Pertumbuhan sektor pariwisata di ASEAN telah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama lebih erat dalam bidang pariwisata melalui pembentukan ASEAN *Tourism Forum (ATF)*, yang diselenggarakan setiap tahun untuk membahas pertukaran ide, meninjau perkembangan industri, dan memberikan rekomendasi untuk mempercepat pertumbuhan wisatawan. Salah satu proyeksi yang difokuskan adalah mempromosikan ASEAN sebagai tujuan wisata yang menarik dan memiliki banyak sisi untuk menjadi kawasan pariwisata tunggal yang kompetitif di Asia Pasifik. Proyeksi itu dimuat dan difokuskan pada rencana arahan strategis pengembangan sektor pariwisata di tingkat ASEAN yang disebut ASEAN *Tourism Strategic Plan (ATSP)*. Konsep ini diusung dengan tujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai tujuan wisata berkualitas dengan menawarkan pengalaman ASEAN yang unik dan beragam, serta akan berkomitmen pada pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan, inklusif, dan seimbang.

¹ Corresponding author.

E-mail: bagusalfiansantoso2704@gmail.com

Indonesia, sebagai anggota ASEAN telah menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan dan inklusif melalui Pengembangan *Project Ten New Bali's*. Konsep ini berfokus pada melibatkan komunitas lokal dan sektor publik-swasta dalam rantai nilai pariwisata dengan menerapkan dua poin dari ASEAN *Tourism Strategic Plan* periode 2016-2025. Sebagai contohnya, masyarakat telah melakukan pengembangan desa wisata dan homestay di Bali Baru (Rahayu Dini Septyana & Sulistyawati Dewi, 2021). Disamping itu, konsep ini telah diakomodir oleh Pemerintah Daerah Labuan Bajo pada konsentrasi pengembangan pariwisata di Labuan Bajo tahun 2011-2015 yang menjadi salah satu daerah Kawasan Strategi Pembangunan Nasional (KSPN). Meskipun dalam pengimplementasian arahan strategi masih terdapat banyak kendala karena kondisi pariwisata saat itu, namun dengan arahan strategi dalam ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) ini menjadikan Pemerintah Indonesia untuk terus berpacu dalam mengembangkan sektor pariwisata khususnya Labuan Bajo (Stephanie Andriani Moi, 2017). Pada konsentrasi yang sama, implementasi ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) ini juga menjadi dasar dalam tatanan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pengembangan pariwisata, yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia, serta peningkatan dan percepatan fasilitas pelayanan serta konektivitas ASEAN. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala, yakni pariwisata belum sepenuhnya menjadi fokus pembangunan serta belum matangnya perencanaannya pariwisata pada keseluruhan daerah di Sumatera Barat.

Dari beberapa implementasi ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) pada beberapa konsentrasi pengembangan pariwisata di daerah, perlu adanya fokus prioritas yang mendorong adanya efektivitas dalam menerapkan arahan strategi pariwisata dengan menyesuaikan terhadap kondisi masing-masing daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pariwisata berkelas dunia dengan daya saing yang tinggi dan berkelanjutan, serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Hal ini didukung oleh enam fokus prioritas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk percepatan industri dan pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah implementasi program pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas di lima wilayah di Indonesia. Upaya Indonesia ini juga sesuai dengan tujuan ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) 2016-2025 untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan dan inklusif di ASEAN. Implementasi ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) dapat diterapkan di daerah di Indonesia untuk memaksimalkan potensi pariwisata dan keunikan, terutama di daerah yang tidak termasuk dalam daerah pembangunan pariwisata super prioritas oleh pemerintah, seperti Banyuwangi. Banyuwangi adalah sebuah Kabupaten di ujung timur Provinsi Jawa Timur, di sebelah utara Situbondo, di sebelah timur Selat Bali, dan di sebelah selatan Samudera Hindia. Banyuwangi memiliki kekayaan alam, seni, budaya, dan adat istiadat yang kaya. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan program "Banyuwangi Rebound" yang terdiri dari tiga ekosistem: penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan merajut harmoni. Program ini dirancang untuk menangani COVID-19 dan meningkatkan kesehatan umum, mengembangkan UMKM, pertanian, infrastruktur, pembangunan perdesaan, pariwisata, serta memperkuat solidaritas sosial, pendidikan, keberlanjutan lingkungan, dan kerukunan antar umat beragama.

Dalam rangka mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata di Banyuwangi, peneliti tertarik untuk mengintegrasikan pengembangan pariwisata di Banyuwangi dengan arah strategis ASEAN yang telah diterapkan di Desa Kemiren Banyuwangi sejak tahun 2017. Desa Kemiren terpilih sebagai Desa Wisata karena potensi sumber daya alam, budaya, dan manusia yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan pariwisata di Banyuwangi. Program Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi juga mendukung pengembangan pariwisata di Banyuwangi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berfokus pada judul "Implementasi ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) Dalam Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi". Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: (1) Untuk mengetahui Implementasi ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) dalam Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, (2) Untuk memberikan rekomendasi terkait arah pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Banyuwangi berdasarkan konsep ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP).

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui keselarasan arah kebijakan terhadap implementasi kerangka ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) pada tatanan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, serta mampu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implikasinya sesuai dengan proses integrasi kebijakan pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan arah dan aksi strategis ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP).

Tabel 1
Kerangka ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP)

No.	Aksi Strategi	Aktivitas
Arah Strategi 1: Meningkatkan Daya Saing ASEAN sebagai Destinasi Pariwisata Tunggal		
1.	Mengintensifkan Promosi Dan Pemasaran	Meningkatkan kerangka statistik pariwisata ASEAN Perluas program pemasaran destinasi regional ASEAN
2.	Diversifikasi Produk Pariwisata	Menyelesaikan pendekatan pengembangan dan pemasaran produk baru yang sedang berjalan dan mengidentifikasi mendukung pengembangan destinasi/ koridor sub-regional ASEAN yang menargetkan hasil pariwisata yang lebih inklusif
3.	Menarik Investasi Pariwisata	Menyiapkan program investasi pariwisata ASEAN yang mengidentifikasi investasi koridor di mana konvergensi dan konsolidasi investasi dalam infrastruktur dan produk pariwisata akan berlangsung
4.	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Mempromosikan liberalisasi lebih lanjut dari layanan pariwisata Melanjutkan implementasi ASEAN <i>Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals</i> (MRA-TP) Mempersiapkan dan mengimplementasikan rencana pengembangan sumber daya manusia pariwisata ASEAN berkoordinasi dengan jaringan manajemen dan pengembangan sumber daya pariwisata ASEAN (ATRM)
5.	Menerapkan dan Memperluas Standar Pariwisata ASEAN untuk Fasilitas, Layanan Dan Tujuan	Mempromosikan adopsi dan implementasi sistem sertifikasi standar pariwisata ASEAN ke dalam kebijakan dan kerangka kerja HRD
6.	Menerapkan dan Memperluas Konektivitas dan Infrastruktur Destinasi	pariwisata Negara Anggota Meningkatkan Konektivitas Udara ASEAN dengan mendukung implementasi ASEAN Pasar Penerbangan Tunggal (ASAM) Mempromosikan pengembangan wisata kapal pesiar dan sungai termasuk infrastrukturnya untuk pelayaran laut dan sungai Menerapkan Perjanjian tentang Pengakuan Izin Mengemudi Domestik yang dikeluarkan oleh Negaranegara ASEAN untuk mempromosikan pariwisata berkendaraan/ darat di seluruh ASEAN Mempromosikan pengembangan konektivitas jalan di sepanjang koridor pariwisata utama
7.	Meningkatkan fasilitasi perjalanan	Menyiapkan <i>white paper</i> untuk melaksanakan fasilitasi perjalanan intra-ASEAN dan internasional (Pasal 2 ASEAN <i>Tourism Agreement</i> 2002)
Arah Strategi 2 : Memastikan Pariwisata ASEAN Berkelanjutan dan Inklusif		
1.	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal dan Sektor Publik-Swasta dalam Pariwisata rantai nilai	Mengembangkan dan menerapkan strategi partisipasi masyarakat lokal dan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata
2.	Pastikan Keselamatan dan Keamanan, Prioritaskan Perlindungan dan Pengelolaan Situs Warisan	Bekerja dengan badan dan organisasi resmi untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan perlindungan destinasi utama di ASEAN Bekerja dengan badan dan organisasi resmi untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan situs cagar budaya
3.	Meningkatkan Ketangguhan terhadap Perlindungan Lingkungan dan Perubahan Iklim	Bekerja dengan badan dan organisasi resmi untuk menangani lingkungan, dan meningkatkan responsivitas terhadap perubahan iklim Siapkan manual pedoman untuk menggabungkan lingkungan dan iklim mitigasi perubahan, adaptasi, dan ketahanan

Sumber : *Produced by the Philippine Department of Tourism as Lead Coordinator for the ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025*

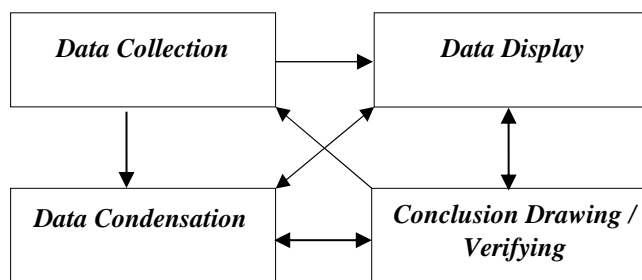
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan melibatkan subjek yang mencakup elemen

pentahelix sebagai pihak berwenang sekaligus membidangi terkait topik penelitian. Penentuan narasumber ini dipilih dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Adapun narasumber yang terlibat dalam penelitian ini meliputi:

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
3. Kepala Bidang Pemasaran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
4. Wakil Ketua Generasi Pesona Indonesia Banyuwangi
5. Jurnalis Media Detik. Com
6. Dosen Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi
7. Puteri Pariwisata Nusantara

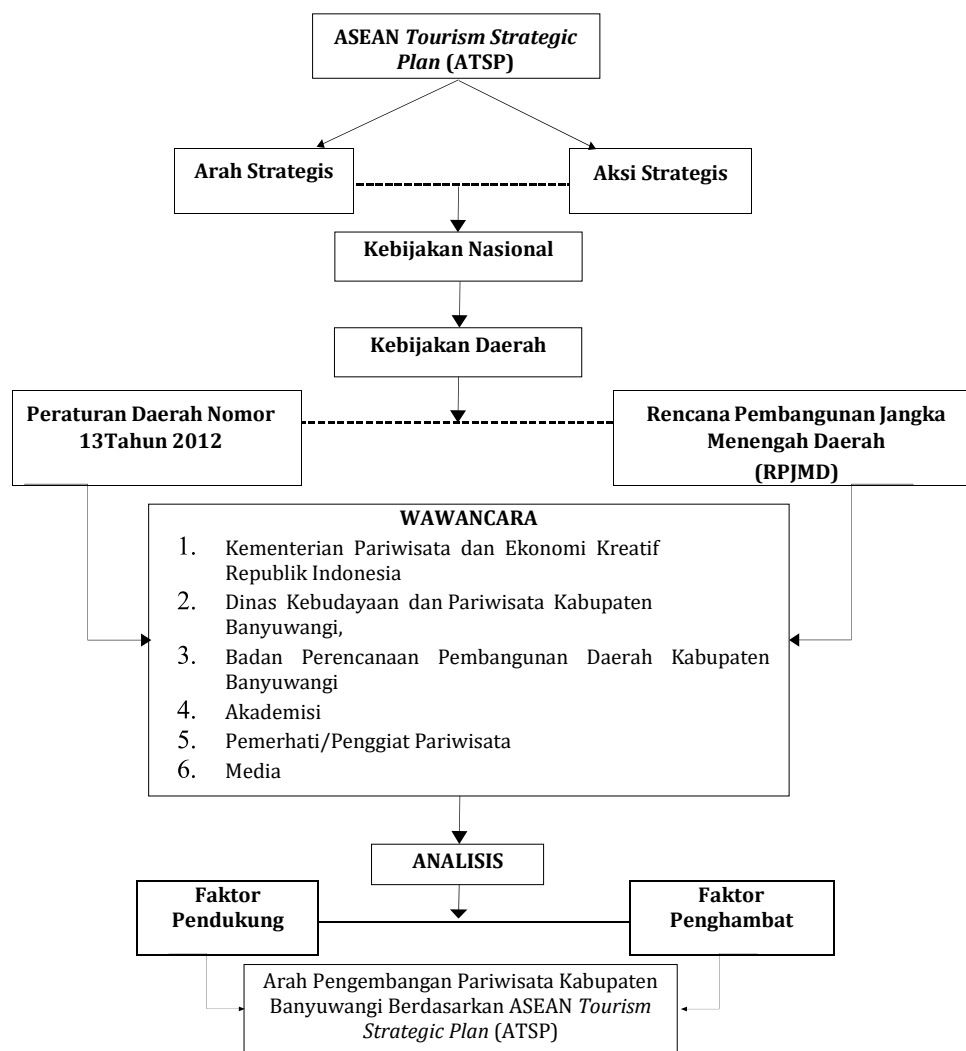
Sedangkan data sekunder sebagai objek inti penelitian diperoleh berdasarkan basis pada kerangka ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) periode 2016-2025 dan Kebijakan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Tabel 1 menunjukkan kerangka ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP).

Data pada penelitian ini dianalisis berdasarkan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2014), yaitu data collection, data condensation, data display, dan conclusion drawing/verification yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada topik penelitian. Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.



Gambar 1. Komponen dalam analisis data kualitatif/model interaktif Miles & Huberman (2014)

Pada Gambar 1 Komponen dalam analisis data (interactive model) Model Miles & Huberman (2014) dijelaskan model analisis data interaktif dimulai dari pengumpulan data yakni arahan dan aksi strategis model pariwisata ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP), Kebijakan Nasional, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi, serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012. Setelah dikumpulkannya data akan disajikan data untuk dijabarkan, dengan dilanjutkan proses untuk integrasi data sebagai sinkronisasi dan penyelarasan dan pada tahapan terakhir disimpulkan berdasarkan hasil analisis melalui data yang ada dan temuan ketika melakukan observasi maupun wawancara.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran (Peneliti)

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya dasar perencanaan konsep penelitian yang akan dijalankan melalui kerangka pemikiran. Harapan dari adanya kerangka pemikiran ini adalah untuk menata dan menstrukturalisasi langkah penelitian agar mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kerangka pemikiran dari penelitian “Implementasi ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) Dalam Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi” ini diawali dengan sinkronisasi arah dan aksi strategi ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) sebagai kontrol yang kemudian diturunkan melalui kebijakan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi.

Pada penelitian ini data kualitatif selain diperoleh dari dokumen ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi juga didapat melalui hasil observasi dan wawancara kepada beberapa pihak yang berfokus pada kebijakan strategis sebagai bentuk verifikasi kesesuaian analisis data, meliputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Akademisi Pariwisata, Praktisi Pariwisata dan Penggiat Pariwisata dan Bidang Media. Data kualitatif yang dikumpulkan dan ditemukan pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut

Miles and Huberman yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) Dalam Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi

a. Meningkatkan Daya Saing sebagai Destinasi Pariwisata Tunggal

Pada bagian ini, komponen bahasan yang akan difokuskan terkait implementasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan kerangka investasi pariwisata yang lebih kondusif, meningkatkan keterampilan pelayanan dan kualitas sumber daya manusia pariwisata, mempromosikan destinasi dan diversifikasi produk, meningkatkan tujuan dan kualitas produk, dan bergerak ke tingkat yang tinggi tujuan tematik dan pengalaman yang terfokus serta pemasaran dan promosi produk pendekatan. merencanakan, merancang dan mengimplementasikan program dan proyek yang terkait dengan peningkatan dan memperluas infrastruktur konektivitas, memfasilitasi perjalanan lintas batas, dan investasi dalam pembangunan infrastruktur destinasi (hardware/software). Tabel 2 memberikan lampiran hasil analisis data berdasarkan kerangka pertama.

Tabel 2

Kerangka Pertama ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)

No.	Kebijakan ASEAN	Kebijakan Nasional	Kebijakan Banyuwangi
1.	Intensifikasi Promosi Dan Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> Membangun jejaring komunikasi pemasaran dengan perwakilan di Luar Negeri melalui VITO (<i>Visit Indonesia Tourism Officer</i>) Berpartisipasi dalam event promosi dan pemasaran yang strategis di Luar Negeri. Menyusun strategi komunikasi pemasaran sesuai target <i>market</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan media untuk mengenalkan Pariwisata dan budaya banyuwangi. Pembangunan Terminal Wisata Terpadu sebagai salah satu juga program pemerintah kabupaten Banyuwangi untuk kepariwisataan mencakup pusat oleh-oleh, pusat informasi pariwisata dan kegiatan pariwisata. Melaksanakan kegiatan promosi pariwisata dengan melibatkan para <i>influencer</i> terkenal. Menyelenggarakan program Banyuwangi Festival setiap tahun. Menjadikan semua dinas adalah lingkup Pariwisata
2.	Diversifikasi Produk Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> Penggarapan salah satunya ajang wisata olahraga berskala internasional yang juga diimbangi dengan lompatan pengembangan bisnis yang melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyandingkan UMKM dan Pertanian sebagai sektor yang mampu meningkatkan diversifikasi produk pariwisata. Merambah ke bidang Kesatuan, Kebangsaan dan Politik. Mulai mengembangkan homestay dengan menjual paket experience dimana wisatawan ikut kegiatan keseharian pemilik homestay.
3.	Menarik Investasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan kawasan strategis dan dengan promosi kepada investor. Penyusunan materi potensi dan peluang investasi parekraf di daerah dengan syarat lahan clear and clear serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Menyebarkan potensi dan peluang investasi parekraf kepada potensial investor melalui keikutsertaan pada event investasi baik di dalam maupun luar negeri. Pendampingan kepada calon investor yang akan melakukan penanaman modal di sektor parekraf 	<ol style="list-style-type: none"> Mempermudah perizinan yang akan melakukan investasi di Banyuwangi, tentu yang sesuai dengan <i>blue print</i> kebijakan pemerintah daerah Banyuwangi. Menetapkan kebijakan tentang investasi yang masuk untuk membangun. Tetap membawa konsep kearifan lokal daerah dan melibatkan masyarakat sebagai pemicu atraksi wisata. Penyediaan lahan kosong di tempat wisata untuk memberikan kesempatan investor. Menjadikan pariwisata sebagai sektor utama yang harus dikedepankan apabila terdapat investasi pembangunan. Menetapkan kebijakan investasi hotel pembangunan hotel berbintang yang boleh beroperasi di Banyuwangi adalah bintang tiga ke atas.
4.	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan perhatian kepada masyarakat untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya pariwisata melalui program Gerakan Sadar Wisata. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM Pariwisata di Banyuwangi yang juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan swasta.

Daya Manusia Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 2. Membangun ekosistem yang memadai bagi perkembangan SDM Pariwisata melalui penyusunan standar kompetensi. 3. Membantu dalam mencetak pelatih dan penguji (asesor). 4. Fasilitasi pelatihan berbasis kompetensi hingga sertifikasi kompetensi. 	
5. Penerapan dan Perluasan Standar Pariwisata ASEAN untuk Fasilitas, Layanan Dan Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk membantu pengelola usaha pariwisata memperoleh kepercayaan dari pasar, melalui sertifikasi CHSE. 2. Dikeluarkan kebijakan sertifikasi kepada penyedia jasa usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan desa wisata berbasis berkelanjutan bersama Kemenparekraf dan ISTC. 2. Menetapkan kebijakan pengembangan pariwisata dengan standar CHSE. 3. Menekankan pembangunan pariwisata yang sehat dan aman serta berbasis lingkungan atau <i>ecotourism</i>.
6. Penerapan dan Perluasan Konektivitas Dan Infrastruktur Destinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saat ini pengembangan konektivitas didukung Kementerian Pekerjaan Umum yang memiliki kewenangan untuk membangun aksesibilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pembangunan Infrastruktur dengan pengarahannya ke daerah tujuan wisata. 2. Meluncurkan program angkutan umum gratis yang bekerjasama dengan dari Dinas Perhubungan untuk memberikan fasilitas kepada wisatawan menengah kebawah. 3. Melakukan pengarahannya terkait standar penetapan harga operasi transportasi agar tidak ada proses pemalakan kepada wisatawan. 4. Menggenjot operasi bandara dengan menambah maskapai.
7. Peningkatan fasilitas Perjalanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terselenggaranya <i>event</i> di Indonesia, khususnya MICE untuk mendorong fasilitasi pihak pemerintah atau swasta dari negara asal wisatawan untuk dapat memberikan dukungan perjalanan kepada anggotanya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempermudah akses perjalanan wisatawan. 2. Mengarahkan <i>tour operator</i> untuk membuat paket wisata terintegrasi. 3. Memperbaiki infrastruktur dan melakukan promosi secara umum dan meluas. 4. Membuat regulasi untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan. 5. Menyediakan ruang khusus konsultasi pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menampung setiap pelaku wisata ketika ada keluhan, semisal tidak ada fasilitas pendukung.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Tabel yang dipaparkan di atas merupakan data yang diperoleh dari wawancara dan rujukan kebijakan yang menyangkut muatan tentang ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP), Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Daerah Banyuwangi. Berdasarkan pada analisis data yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang linier dengan kebijakan nasional sudah mengarah dan menerapkan secara parsial konsep ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) pada kerangka pertama. Hal tersebut tergambar dari penjabaran pada setiap poin kebijakan atau arahan strategis yang dijalankan pada masing-masing tingkatan.

Memastikan Pariwisata ASEAN Berkelanjutan dan Inklusif

Pada bagian ini, komponen bahasan yang akan difokuskan terkait implementasi kebijakan untuk merencanakan, merancang dan menerapkan program dan proyek yang terkait dengan peningkatan respons terhadap perubahan iklim, memastikan keselamatan dan keamanan, memprioritaskan perlindungan dan pengelolaan situs warisan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam rantai nilai pariwisata di tingkat destinasi.

Tabel 3
Implementasi Kebijakan

No.	Kebijakan ASEAN	Kebijakan Nasional	Kebijakan Banyuwangi
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lokal dan Sektor Publik-Swasta dalam pariwisata rantai nilai	1. Pengembangan desa wisata dan desa kreatif, agar manfaat dari adanya pembangunan parekraf dapat langsung dirasakan oleh masyarakat	1. Pengoptimalan peran kelompok sadar wisata 2. Mengangkat kegiatan adat lokal sebagai festival yang juga melibatkan masyarakat dan sektor lain 3. Menggeliatkan program smart kampung dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa.
2.	Pastikan Keselamatan dan Keamanan, Prioritaskan Perlindungan dan Pengelolaan Situs Warisan	1. Melalui pembangunan pariwisata berkelanjutan yang disampaikan dalam bentuk seminar dan pelatihan, serta <i>event</i> yang mengangkat muatan tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan.	1. Melakukan sosialisasi kepada warga untuk melindungi dan menjaga situs atau warisan lain 2. Proses pembentukan peraturan daerah terkait perlindungan situs warisan. 3. Mendatangkan arkeolog bahkan <i>recruitment</i> arkeolog apabila terdapat situs warisan 4. Menyelenggarakan festival yang mengangkat budaya dan tradisi lokal agar tetap lestari, untuk menjaga agar budaya tidak hilang.
3.	Peningkatan Ketanggapan Terhadap Perlindungan Lingkungan dan Perubahan Iklim	1. Saat ini pembangunan pariwisata semakin diarahkan untuk lebih menerapkan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan, selain itu juga disosialisasikan tentang <i>carbon offsetting</i> di Industri pariwisata agar dapat membantu untuk mengurangi dampak industri terhadap perubahan iklim. 2. Meluncurkan program Carbon Footprint Calculator sebagai upaya dalam membantu mencegah dampak buruknya pada iklim.	1. Membuat dan menetapkan konsep pembangunan hampir semua sektor mengadopsi <i>green architecture</i> . 2. Tidak memberikan perizinan dalam bentuk apapun apabila terdapat pembangunan yang tidak ramah lingkungan. 3. Melakukan pengelolaan sampah dengan <i>eco ranger</i> , dengan sistemik dari luar negeri.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Tabel yang dipaparkan di atas merupakan data yang diperoleh dari wawancara dan rujukan kebijakan yang menyangkut muatan tentang ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP), Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Daerah Banyuwangi. Berdasarkan pada analisis data yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang linier dengan kebijakan nasional sudah mengarah dan menerapkan secara parsial konsep ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) pada kerangka kedua. Hal tersebut tergambar dari penjabaran pada setiap poin kebijakan atau arahan strategis yang dijalankan pada masing-masing tingkatan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) Terhadap Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

1. Faktor Pendukung

a. Keberagaman Potensi Pariwisata

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, menerangkan bahwa keberagaman potensi pariwisata Kabupaten Banyuwangi mampu menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan apabila dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Dengan memprioritaskan terhadap pengembangan daerah yang potensial dengan diikuti pemerataan pembangunan terhadap daerah lain sebagai penyangga daerah prioritas. Seperti yang tertuang pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Banyuwangi, terdapat tiga wilayah yang dijadikan sebagai prioritas pengembangan yakni Zona 1 (Taman Wisata Alam Kawah Ijen), Zona 2 (Pantai Plengkung/G-Land) dan Zona 3 (Pantai Sukamade). Konsep ini juga selaras dengan (Soebagyo, 2012) tentang strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan mampu dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, perlu menentukan Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama yang memiliki keunikan dibanding dengan Daerah Tujuan Wisata (DTW) lain, terutama yang bersifat tradisional dan alami.

b. Optimalisasi Penerapan Kolaborasi

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, menerangkan bahwa secara garis besar kolaborasi di Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan cukup baik, bahkan saat ini sudah menambah

sektoral baru yang mengarah pada kolaborasi hexahelix. Akan tetapi diperlukan peningkatan dalam melibatkan peran pemuda sebagai generasi penerus. Sehingga, pengembangan pariwisata tidak hanya didominasi oleh beberapa pihak saja, melainkan semua elemen memiliki hak yang sama dalam terlibat dan ikut serta memberikan masukan dan ide gagasan.

c. Konsistensi Dalam Menciptakan Inovasi

Dalam rangka memaksimalkan potensi daerah, Kabupaten Banyuwangi terus melakukan inovasi pariwisata. Hal ini terbukti pada tahun 2022 ini, Banyuwangi kembali meraih prestasi yang luar biasa. Dua inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masuk pada Top 99 Kompetisi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri-RB). Dua inovasi tersebut diantaranya homestay naik kelas dan pasar pelayanan publik. Program homestay naik kelas merupakan inovasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana, serta jumlah kunjungan homestay. Program ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan SDM, tata kelola *homestay*, pembuatan standarisasi klasifikasi *homestay*, dukungan CSR, hingga bantuan promosi homestay secara online (Sumber : banyuwangikab.go.id, 2022).

d. Adaptasi Untuk Pemulihan Sektoral

Banyuwangi *Rebound* dibangun di atas tiga pilar dan dua fondasi penting. Pilar tersebut meliputi tangguh pandemi, pulihkan ekonomi, dan merajut harmoni. Sedangkan fondasi yang menopangnya adalah pelayanan publik yang ekselen dan partisipasi aktif publik. Pertama, ekosistem penanganan pandemi yang terdiri atas berbagai langkah tangani COVID-19 dan meningkatkan derajat kesehatan warga secara umum. Kedua, pemulihan ekonomi. Mulai program pengembangan UMKM, pertanian, infrastruktur, pembangunan perdesaan, hingga pariwisata telah dirancang. Semuanya didesain untuk membuka lapangan kerja serta memulihkan pergerakan ekonomi warga. Ketiga adalah merajut harmoni. Ikhtiar memperkuat solidaritas solidaritas sosial, mengembangkan SDM dari sisi pendidikan, menjaga keberlanjutan lingkungan, hingga memperkuat kerukunan antar umat beragama ada pada ekosistem ini (Sumber: Detik. Com, 2022)

2. Faktor Penghambat

a. Kesiapan Masyarakat Lokal

Dalam rangka melakukan perkembangan pariwisata, tentu harus berjalan secara beriringan dengan kesiapan masyarakat sebagai salah satu pelaku pariwisata. Namun, berbeda dengan keadaan di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa perkembangan pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang sangat pesat seperti saat ini belum diimbangi dan berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusianya. Berdasarkan pada ungkapan dan konsep yang telah dikemukakan di atas, peneliti bermaksud menyederhanakan bahwa pengembangan pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang pesat saat ini belum diimbangi dengan kesiapan Sumber Daya Manusia pariwisata secara menyeluruh dan merata.

b. Kurangnya Investasi

Dalam hal investasi pariwisata, Kabupaten Banyuwangi tergolong masih rendah apabila dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini terlihat dari data Dashboard OSS Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kabupaten Banyuwangi periode 2019-2021 yang menunjukkan, jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 23.490 dan proyek/kegiatan usaha sebanyak 26.544 dengan total investasi sebesar Rp. 740.936.436.628. Sedangkan nilai investasi yang ada di Kota Surabaya mencapai Rp 29, 22 Triliun pada tahun 2021 (Sumber: www.liputan6.com, 2022).

c. Inkonsistensi Promosi Pariwisata

Promosi kini menjadi penting untuk perkembangan sektor pariwisata dalam mengenalkan potensi masing-masing daerah yang mampu menarik minat kunjung wisatawan. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama semua elemen agar mampu memaksimalkan pergerakan promosi secara meluas. Sehingga, penyebaran informasi dan hal-hal menarik lainnya tentang pariwisata akan mudah dengan cepat diketahui oleh wisatawan. Namun dalam penerapannya, promosi harus dilakukan secara konsisten dan masif. Agar wisatawan dapat selalu mengingat dan tidak lupa dengan produk pariwisata yang sedang dipromosikan. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan temuan bahwa Kabupaten Banyuwangi dalam hal

melakukan promosi pariwisata terkadang tidak konsisten. Terutama pada sesuatu yang sudah viral, sebelum mendatangkan banyak keuntungan sudah ditinggal beralih pada promosi yang lain. Dari ungkapan dan penjelasan tersebut, peneliti bermaksud untuk menyederhanakan bahwa promosi di Kabupaten Banyuwangi sudah dilakukan dengan cukup baik. Baik promosi secara langsung maupun melalui sosial media dengan juga menggandeng beberapa akun media sosial mitra pemerintah. Namun, terkadang masih inkonsistensi pada sesuatu hal yang sudah viral.

d. Keberadaan Daerah Lain Yang Potensial

Semakin berkembangnya sektor pariwisata dan manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menjadikan setiap daerah berlomba-lomba memunculkan potensi untuk dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan dari sektor pariwisata. Hal ini juga dapat menjadi salah satu hambatan Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu menjadi penopang perekonomian daerah. Semakin berkembangnya sektor pariwisata dan manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menjadikan setiap daerah berlomba-lomba memunculkan potensi untuk dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan dari sektor pariwisata. Hal ini juga dapat menjadi salah satu hambatan Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu menjadi penopang perekonomian daerah.

Arah Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)

1. Pengembangan Sektor Pariwisata Banyuwangi sebagai Destinasi Pariwisata Tunggal
Berdasarkan pada hasil analisis dari penelitian, menerangkan bahwa pengembangan pariwisata Kabupaten Banyuwangi untuk saat ini masih belum mengarah pada pariwisata tunggal meskipun dari semua aspek sesuai kerangka ATSP sudah diterapkan dengan baik. Melainkan, Kabupaten Banyuwangi mengupayakan dan mengarahkan pengembangan pariwisata berbasis unggulan dengan inovasi kebijakan dan pelaksanaan program kreatif pariwisata yang digencarkan. Namun demikian, untuk mencapai tujuan arah pengembangan pariwisata unggulan, kesiapan SDM menjadi penting. Sehingga perlu adanya peningkatan upaya Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kapabilitas dan kualitas SDM dengan tidak hanya berfokus pada Pendidikan dan pelatihan saja, tetapi juga mengarah pada peningkatan pengetahuan, kesadaran serta membangun ekosistem yang memadai bagi perkembangan SDM.
2. Pengembangan Sektor Pariwisata Banyuwangi Yang Berkelanjutan dan Berbasis Inklusi
Berdasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkuat dengan analisis pada penelitian, menerangkan bahwa pengembangan pariwisata Kabupaten Banyuwangi saat ini sejalan dengan pengembangan pariwisata nasional sesuai dengan kerangka acuan ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP). Pengembangan pariwisata yang dimaksud adalah mengarahkan pengembangan pariwisata ke arah pariwisata berkelanjutan. Hal ini terbukti dari aspek kerangka acuan ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuwangi.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan pada pemaparan hasil penelitian dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan dari hasil pembahasan sebagai berikut:

Implementasi *ASEAN Tourism Strategic Plan* (ATSP) dalam tatanan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah dilakukan dengan sangat baik. Hal ini tergambar jelas pada pembahasan pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Banyuwangi berdasarkan dua kerangka arahan ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP), yakni:

1. Pada muatan kebijakan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, yang didasarkan pada kerangka acuan ASEAN *Tourism Strategic Plan*, sudah terimplementasikan secara parsial dalam tatanan kebijakan daerah. Kebijakan tersebut mengarah pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi yang meningkatkan daya saing sebagai pariwisata tunggal, sesuai dengan arah strategis pengembangan pariwisata nasional. Namun, terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan antara ASEAN, nasional, dan Kabupaten Banyuwangi dalam hal peningkatan

kapabilitas dan kualitas SDM serta upaya menarik minat investasi. Sedangkan, dalam hal pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berbasis inklusi, Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan semua aspek sesuai dengan kerangka acuan ATSP, tetapi masih perlu optimalisasi dalam melibatkan masyarakat dan sektor publik-swasta dalam pengembangan pariwisata.

2. Pada komite pertama, pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi saat ini masih belum mengarah pada pariwisata tunggal, meskipun semua aspek sesuai dengan kerangka acuan ASEAN *Tourism Strategic Plan* sudah diterapkan dengan baik. Sebaliknya, Kabupaten Banyuwangi berusaha untuk mengembangkan pariwisata berbasis unggulan dengan inovasi kebijakan dan program kreatif pariwisata yang digencarkan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, kesiapan SDM menjadi penting, sehingga Pemerintah Daerah harus meningkatkan upaya untuk mengembangkan kapabilitas dan kualitas SDM dengan cara yang lebih luas dari sekadar pendidikan dan pelatihan, tetapi juga dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan membangun ekosistem yang memadai bagi perkembangan SDM. Pada komite kedua, pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi sejalan dengan pengembangan pariwisata nasional sesuai dengan kerangka acuan ASEAN *Tourism Strategic Plan*, dengan fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan. Hal ini terbukti dari implementasi aspek kerangka acuan tersebut oleh Kabupaten Banyuwangi.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keselarasan arah kebijakan terhadap implementasi kerangka ASEAN *Tourism Strategic Plan* pada tatanan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis Miles and Huberman. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini mencakup elemen pentahelix dengan objek inti berbasiskan pada kerangka ATSP periode 2016-2025 dan Kebijakan pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi sudah mengimplementasikan kerangka acuan pengembangan pariwisata berdasarkan ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) pada tatanan kebijakan pariwisata daerah secara parsial. Namun, dari kedua arah pengembangan pariwisata ASEAN yang juga merupakan turunan Kebijakan Pariwisata Nasional, untuk saat ini Kabupaten Banyuwangi belum mengorientasikan arah pengembangan pariwisata menuju pariwisata tunggal, melainkan pariwisata unggulan. Kerangka acuan ASEAN *Tourism Strategic Plan* sudah terimplementasi secara parsial dalam kebijakan daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Namun, sebelum mengimplementasikannya secara keseluruhan, Pemerintah Daerah lebih baik melakukan hilirisasi ASEAN *Tourism Strategic Plan* terlebih dahulu secara masif pada tatanan kebijakan daerah.
4. Meningkatkan konsistensi dalam pembangunan pariwisata dengan memfokuskan pada sektor pariwisata. Dengan potensi pariwisata yang lengkap di Kabupaten Banyuwangi, seharusnya mampu menjadikannya sebagai *leading sector* atau daerah pariwisata tunggal yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan pariwisata harus dilakukan secara bertahap dan terkait dengan kesiapan masyarakat lokal. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak merasakan shock akibat peningkatan pariwisata yang cepat, dan agar peran masyarakat dapat dijalankan secara maksimal. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima keuntungan dari adanya pariwisata, tetapi juga sebagai pelaku pariwisata yang memiliki hak untuk memberikan ide dan masukan dalam pengembangan pariwisata daerah.
6. Mengarahkan setiap daerah sebaiknya memiliki destinasi atau produk pariwisata yang saling mendukung dan menampilkan karakteristik daerah masing-masing sesuai dengan potensi yang dimilikinya, tanpa memaksakan atau memanipulasi potensi. Hal ini dilakukan dengan mapping potensi pariwisata oleh Pemerintah yang berkolaborasi dengan akademisi berdasarkan keadaan geografis dan indikator penunjang lainnya, yang didukung juga dengan peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM.
7. Tidak hanya berfokus pada kuantitas pariwisata dengan memunculkan destinasi baru, tetapi juga memperhatikan kualitas pariwisata. Dengan meningkatkan penguatan kapabilitas dan kualitas SDM dengan tidak hanya berfokus pada Pendidikan dan pelatihan saja. Tetapi juga berorientasi pada peningkatan pengetahuan masyarakat, dan menciptakan ekosistem pengembangan SDM pariwisata yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

8. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi harus berorientasi pada inovasi yang memperhatikan output yang jelas, berkelanjutan, dan tepat guna dari program yang ditetapkan, agar dapat berkembang secara seimbang dan terintegrasi.

Daftar Rujukan

- Abdoellah, A., & Rusfiana, R. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. Alfabeta Bandung.
- Adwiyah, R. (2015). Kesiapan sumber daya manusia bidang pariwisata Indonesia dalam menghadapi MEA 2015. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa)*, 12 (1): 1829-8680.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta Bandung.
- Dewan Perwakilan Indonesia. (2016). Terjemahan paris agreement to the United Nations framework convention on climate change. Retrieved from dpr.go.id:https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-26-99d0d68ca9b94161bbdc07fc0a17cc37.pdf
- Fachri. (2022). Ternyata dua inovasi ini yang bikin Pemkab Banyuwangi masuk top 99 Sinovik 2022. Retrieved from Liputan6.com: <http://surl.li/friib>
- Fanani, A. (2022, Maret 26). Banyuwangi rebound bikin Bupati Ipuk jadi tokoh pemda inspiratif. Retrieved from [detik.com](https://www.detik.com/jatim/berita/d-6002625/banyuwangi-rebound-bikin-bupati-ipuk-jadi-tokoh-pemda-inspiratif/amp): <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6002625/banyuwangi-rebound-bikin-bupati-ipuk-jadi-tokoh-pemda-inspiratif/amp>
- Indraningsih, K. A. (2019). Implementasi kebijakan pembangunan pariwisata Kota Palu. *Jurnal Pariwisata PaRAMA*, 31-40.
- Junida, A. I. (2020, Januari 18). Bersiap menjadikan ASEAN destinasi wisata tunggal. Retrieved from [m.antaranews.com](https://m.antaranews.com/amp/berita/1254749/bersiap-mengjadikan-asean-destinasi-wisata-tunggal): <https://m.antaranews.com/amp/berita/1254749/bersiap-mengjadikan-asean-destinasi-wisata-tunggal>
- Jupir, M. M. (2013). Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal (Studi di kabupaten Manggarai Barat). *Journal Of Indonesian Tourism and Development Studies*, 28-37.
- Kabar Banyuwangi. (2019). Desa Kemiren, Banyuwangi raih penghargaan desa wisata terbaik ketiga se-Indonesia. Retrieved from [banyuwangikab.go.id](https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/desa-kemiren-banyuwangi-raih-penghargaan-desa-wisata-terbaik-ketiga-se-indonesia.html): <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/desa-kemiren-banyuwangi-raih-penghargaan-desa-wisata-terbaik-ketiga-se-indonesia.html>
- Kabar Banyuwangi. (2022). Bupati Banyuwangi ajak pers gaungkan Banyuwangi Rebound. Retrieved from [banyuwangikab.go.id](https://www.banyuwangikab.go.id/berita/bupati-banyuwangi-ajak-pers-gaungkan-banyuwangi-rebound): <https://www.banyuwangikab.go.id/berita/bupati-banyuwangi-ajak-pers-gaungkan-banyuwangi-rebound>
- Kememparekraf. (2022). Memparekraf: Pentingnya kualitas SDM untuk pengembangan dan penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi. Retrieved from [kemparekraf.go.id](https://kemparekraf.go.id/berita/siaran-pers-memparekraf-pentingnya-kualitas-sdm-untuk-pengembangan-dan-penerapan-pariwisata-berkelanjutan-di-destinasi): <https://kemparekraf.go.id/berita/siaran-pers-memparekraf-pentingnya-kualitas-sdm-untuk-pengembangan-dan-penerapan-pariwisata-berkelanjutan-di-destinasi>
- Khairally, E. T. (2022, Mei 14). Sandiaga: Pentingnya kualitas SDM untuk penerapan pariwisata berkelanjutan. Retrieved from [detik.com](https://travel.detik.com/travel-news/d-6077488/sandiaga-pentingnya-kualitas-sdm-untuk-penerapan-pariwisata-berkelanjutan): <https://travel.detik.com/travel-news/d-6077488/sandiaga-pentingnya-kualitas-sdm-untuk-penerapan-pariwisata-berkelanjutan>
- Kominfo. (2022, Mei 12). Delegasi G20 sepakat pentingnya pembiayaan internasional dukung penciptaan iklim pariwisata berkelanjutan. Retrieved from indonesia.go.id: <http://surl.li/frihw>
- Miles, M. &. (2014). *Qualitatif data analysis: An expanded sourcebook*. California: Sage Publications.
- Moenir, H. D. (2017). Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 dalam kebijakan pariwisata indonesia di masa pemerintahan Jokowi. *Andalas Journal of International Studies*, 57-78.
- Moenir, H. D. (2020). Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) dalam kebijakan pariwisata bahari Indonesia. *Jurnal PIR*, 166-189.
- Moenir, H. D. (2021). Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) dalam pengembangan pariwisata sumatera barat. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 49-63.
- Moi, S. A. (2017). Implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 terhadap pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 123-132.
- Nasional, B. P. (2022). Ringkasan eksekutif visi Indonesia 2045. Retrieved from perpustakaan.bappenas.go.id: <http://surl.li/frihk>
- Pemerintah Daerah Banyuwangi. (2013). rencana induk pengembangan kepariwisataan, *Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012. Banyuwangi: Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi*.

- Pemerintah Daerah Banyuwangi. (2021). *Rancangan akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026*. Banyuwangi: Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Pemerintah Daerah Banyuwangi. (2021). Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten banyuwangi tahun 2021-2026, *Salinan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021*. Banyuwangi: Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Secretariat, T. A. (2016). *ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025*. Jakarta: Philippine Department of Tourism as Lead Coordinator for The ASEAN Tourism Strategic Plan.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyawati, D. S. (2021). Implikasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016-2025 dalam pengembangan project Ten NeWw Bali's Indonesia. *Dauliyah Journal*, 248-278.
- UNWTO. (2013). *Sustainable tourism perspective on international for development guidebook*. Madrid: Institutional and Corporate Relations Programme.